

**BULETIN**



# PARLEMENTARIA

NOMOR 905/1/V/2016



## DPR INGIN HUBUNGAN INDONESIA-SERBIA TERUS TERJALIN BAIK

DPR Hadiri Pertemuan  
Kemitraan Parlemen  
Asia Eropa

Hal. 5

Komisi VIII Tinjau Proyek  
Embarkasi Haji Sumbar  
Yang Terbengkelai

Hal. 9

DPR Minta Menteri KKP  
Tinjau kembali Permen  
No.1 Tahun 2015

Hal. 18

**GRATIS**  
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

# DPR Ingin Hubungan Indonesia-Serbia Terus Terjalin Baik

**K**etua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik kedatangan Presiden Serbia Tomislav Nikolic ke Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (28/04). Kedatangan Nikolic dimaksudkan untuk terus menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Serbia, salah satunya di bidang perdagangan.

Ade Komarudin menjelaskan bahwa Serbia adalah negara yang dulunya menjadi bagian dari Yugoslavia dan secara historis hubungan Indonesia dengan Yugoslavia berjalan baik. Sehingga ia ingin hubungan baik itu untuk diteruskan.

"Kami baru saja bertemu dengan Presiden Republik Serbia sebagai kelanjutan untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Serbia. Serbia semula bagian dari Yugoslavia, dan kita tahu bahwa Yugoslavia adalah salah satu negara yang punya hubungan historis dengan Indonesia yang sangat baik," ujar Akom, sapaan Ade Komarudin.

Secara historis Akom menjelaskan, Bung Karno memiliki hubungan baik dengan Josip Broz Tito saat itu. "Bung Karno dan Josip Broz Tito memiliki hubungan baik dalam rangka gerakan non blok dan sekarang dilanjutkan perjalanan historis kedua pemimpin tersebut antara Tomislav Nikolic dengan Joko Widodo yang tadi melakukan makan malam bersama di Istana Negara," terang Akom.

Akom menjelaskan bahwa di DPR juga

terdapat grup kerjasama bilateral Indonesia-Serbia. Sebagai Pimpinan akan mendorong anggota dewan untuk terus melanjutkan hubungan baik tersebut.



*Pimpinan dan Anggota DPR berfoto bersama Presiden Serbia*

"Kebetulan di DPR juga ada grup kerjasama bilateral Indonesia-Serbia. "Kepada anggota dewan saya minta untuk melanjutkan hubungan baik yang sebelumnya dimulai dari Bung Karno tersebut," paparnya.

Selain itu, lulusan UIN Jakarta itu juga menginginkan hubungan antar Parlemen juga harus berjalan baik. "Saya ingin hubungan antar parlemen juga harus berjalan baik," sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, Akom juga membahas soal tantangan internal di Serbia hingga kerjasama di bidang perdagangan. Ia ingin kedua negara bisa saling mengisi dan memperkuat. "Menyikapi tantangan di internal Serbia, tentu kita juga ingin membantu dan memperkuat. Seperti kita ketahui, Serbia

sebenarnya akan masuk Uni Eropa. Sebagai teman lama, kita juga ingin kepentingan Indonesia di Uni Eropa bisa dicapai melalui Serbia," ujar Akom.

Terkait kerjasama di bidang perdagangan, Akom menginginkan antar kedua negara bisa berjalan dengan baik. "Kami membahas hubungan dagang antar kedua negara, dan kita ingin akan selalu berjalan dengan baik. Kami punya hubungan historis yang baik dan akan dilanjutkan di masa mendatang," terangnya.

Pimpinan DPR dari FPG juga memberikan selamat kepada Nikolic karena partainya kembali menang dalam pemilu

Serbia. "Kami juga mengucapkan selamat kepada Nikolic, karena partainya berhasil memenangkan pemilihan umum pada 26 April lalu," tambah dia.

Kepada Ketua DPR, Nikolic menjelaskan, dalam menjalankan pemerintahan di Serbia tidak mudah, mengingat, Nikolic adalah mantan anggota parlemen dan cukup lama menjadi partai oposisi. "Sekarang kami memerintah. Dari partai oposisi menjadi pemerintah itu tidak mudah," jelas Nikolic.

Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto, Wakil Ketua Korpolkam Fadli Zon, Ketua Komisi I Mahfudz Sidiq, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ■



# Delegasi DPR dan Parlemen Tiongkok Bertemu di ASEP



Suasana pertemuan Delegasi DPR dengan Parlemen Tiongkok di Mongolia

**D**elegasi DPR dalam Pertemuan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP) di Mongolia berkesempatan melangsungkan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Tiongkok. Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin pertemuan didampingi anggota delegasi Tantowi Yahya (Wakil Ketua BKSAP DPR) dan dua anggota lainnya yaitu Sudin (FPDIP) serta Mahfudz Abdurrahman (FPKS).

Dalam pertemuan tersebut Fadli menyebut kerja sama dan hubungan diplomatik kedua negara dalam beberapa waktu terakhir meningkat pesat. Hal ini terlihat antara lain dari banyaknya kegiatan saling kunjung antara pemimpin kedua negara. Baginya Tiongkok adalah partner dagang terbesar bagi Indonesia dan salah satu sumber investasi terbesar.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini mengapresiasi dukungan Tiongkok pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air. "Indonesia juga menyambut baik kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok. Salah satunya proyek kereta cepat yang sebenarnya tidak hanya dibutuhkan di ruas Jakarta-Bandung, tetapi dalam konteks dan lingkup yang lebih luas, misalnya Jakarta-Surabaya," ujar dia.

Parlemen Tiongkok menyambut baik terlaksananya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apabila proyek kereta cepat terwujud maka perjalanan Jakarta-Bandung akan dipangkas menjadi hanya 40 menit.

Ketua Delegasi Parlemen Tiongkok meyakini kerja sama kedua negara masih dapat dieksplorasi dan ditingkatkan dalam sejumlah bidang lainnya. Data menunjukkan bahwa Indonesia saat ini adalah tujuan investasi terbesar kedua bagi Tiongkok.

Selanjutnya Delegasi DPR menggelar pertemuan dengan Delegasi Parlemen Spanyol disela-sela Pertemuan Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP) di Mongolia. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon memaparkan kondisi perekonomian terkini Indonesia.

"Indonesia adalah pasar terbuka yang sangat potensial. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia turut melambat sebagai pengaruh dari perlambatan ekonomi global, tetapi tetap menunjukkan performa yang baik. Indonesia adalah eksportir minyak sawit, kopi dan produk-produk pertanian unggulan. Selain itu, dunia pariwisata di Indonesia juga sangatlah menarik. Sebaliknya, masyarakat Indonesia juga banyak yang tertarik dengan Spanyol karena banyaknya warisan budaya Islam di negara tersebut," papar dia.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini juga menyampaikan secara umum, Indonesia adalah negara multi-etnis, multi-agama yang stabil. Namun pasca insiden 9/11, Indonesia mulai menghadapi tantangan meningkatnya resiko terorisme. Muslim di Indonesia menurutnya adalah Muslim moderat yang sangat terbuka pada pluralisme. ■



## BULETIN PARLEMENTARIA

### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,  
(DEPUTI PERSIDANGAN)

### PIMPINAN REDAKSI

Drs.Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

### WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)  
Ahyar Tibi, S.H  
(Kasubag Media Analisis)  
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si  
(Kasubag Media dan Website)

### REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

### SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

### ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

### REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

### FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

### ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: [dpr.pemberitaan@gmail.com](mailto:dpr.pemberitaan@gmail.com)

[www.dpr.go.id/berita](http://www.dpr.go.id/berita)

### PENERBITAN & DISTRIBUSI

#### PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

#### WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

#### STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Barliansyah

#### SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

#### Email

[penerbitandpr@gmail.com](mailto:penerbitandpr@gmail.com)

(isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)

(BKSAP/mp), foto : dok.bksap/hr.



## Agus Hermanto Nilai Realisasi Poros Maritim Kurang

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, kinerja pemerintah dinilai kurang dalam merealisasikan cita-cita poros maritim dunia.

"Sekolah-sekolah pendidikan untuk para pelaut dan pelayar sudah banyak menelurkan lulusan yang ahli dalam bidangnya, namun ternyata infrastruktur dan manajemen kemaritiman belum disiapkan secara baik oleh pemerintah," terangnya saat beraudiensi dengan Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4).

Lebih lanjut menurut Agus, Indonesia mempunyai stok pelaut dan tenaga ahli yang banyak, sehingga tidak mungkin kekurangan. "Tinggal armadanya dan pengaturan manajemen dari tol laut tersebut agar ini bisa tercapai cita-cita pemerintah," ujar Agus.

Agus menilai, jargon tol laut yang dikampanyekan pemerintah belum banyak terwujud, bahkan sampai saat ini masih banyak kekurangan

infrastruktur maritim. Dia berharap pemerintah bisa bekerja lebih cepat lagi untuk mengatasi kekurangan tersebut.

"Tol laut masih sangat kurang, harus ditingkatkan agar yang dicitakan tersambung antara program kemaritiman

yang satu dengan yang lain. Banyak infrastruktur yang belum diselesaikan, pemerintah harus menyelesaikan proyek infrastruktur. Ini merupakan PR yang sangat besar," tandas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Meskipun demikian, Agus



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berdialog dengan perwakilan Solidaritas Pelaut Indonesia

mengungkapkan dukungannya pada program poros maritim pemerintah. "Kita harus mendukung program pemerintah poros maritim, sekarang ini sudah banyak tenaga. Kita harus memperbanyak niaga-niaga laut," tegasnya mantap. ■

(foto) Foto: Rumi/hr

## Ketua DPR Telah Serahkan LHKPN ke KPK

Sesuai dengan janjinya beberapa waktu lalu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah masa reses berakhir, Ketua DPR Ade Komarudin telah memenuhi janjinya untuk menyerahkan LHKPN tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, (21/04).

LHKPN tersebut diserahkan di Ruang Kerja Ketua DPR dan diterima langsung oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa. "Sudah (laporkan LHKPN). Sudah ada tanda terimanya," ujar Akom, panggilan Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ade Komarudin menjelaskan, dirinya terakhir melaporkan LHKPN

pada tahun 2013. Namun, tanda terimanya baru didapatkan hari ini. "LHKPN tahun 2013 itu juga tanda terimanya baru diterima tadi, padahal diserahkan sudah lama. 2013 itu sudah lapor, tanda terimanya baru tadi didapat, diurus tanda terimanya. LHKPN tahun 2016," tuturnya.

Sebelumnya, isu yang beredar menyebutkan Ade Komarudin tidak menyerahkan LHKPN selama 15 tahun adalah tidak benar. Isu itu kemudian dibantah oleh KPK yang telah mengklarifikasi bahwa Akom terakhir menyerahkan LHKPN pada tahun 2010. ■



(foto) Foto: Jaka/hr

Ketua DPR Ade Komarudin menyerahkan LHKPN kepada KPK



## DPR Hadiri Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia Eropa

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengikuti Sidang The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting atau Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia - Eropa di Ulaanbaatar Mongolia, Jumat, (22/4). Pertemuan tersebut resmi dibuka oleh Presiden Mongolia Tsakhia Elbegdorj

Setelah resmi dibuka, Fadli pun ditunjuk sebagai *Keynote Speech* dalam panel *discussion* dengan tema *Connectivity and Effective Multilateralism*.

Selain Fadli Zon, delegasi DPR RI juga diikuti Tantowi Yahya (Golkar), Abdul Kadir Karding (PKB), Sudin (PDIP), Mahfudz Abdurrahman (PKS), juga ikut dalam *Preparatory Meeting* untuk mempersiapkan teknis persiapan sidang.

"Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia berbicara dalam Pertemuan Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa. Saya akan berbicara tentang Membangun Konektifitas dan Multilateralisme yang Efektif untuk Menghadapi tantangan Globalisasi. Saya akan menyampaikan banyak pandangan tentang globalisasi, bahwa globalisasi harus dikritisi," tegas Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta.

Dalam pidatonya, konektifitas dan kerja sama multilateral jelas Fadli, merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data-data dari lembaga internasional, termasuk Organization for Economic Co-Operation and Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan terus mengalami peningkatan.

"Apabila globalisasi tidak dapat kita hentikan, maka kita bisa berupaya untuk menciptakan globalisasi yang adil dan berimbang dari sudut pandang masyarakat global, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemakmuran bersama atau *shared*



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

*prosperity*, interkoneksi, dan manfaat bersama," jelas Fadli.

Dalam menjawab tantangan globalisasi, tambahnya, konektifitas antar wilayah dan kerja sama multilateral dapat diupayakan. Konektifitas dalam hal ini tidak hanya mengacu pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mempererat hubungan antar masyarakat. Sementara itu, kerja sama multilateral haruslah bersifat efektif. Bukan hanya mengacu pada terciptanya kawasan yang tertib, adil, dan sejahtera, tetapi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

"Keterlibatan masyarakat juga merupakan inti dari demokrasi. Bukan hanya demokrasi politik yang kita butuhkan, tetapi mengacu pada pemikiran Wakil Presiden Indonesia yang pertama Bung Hatta, demokrasi sosial yang merupakan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi," terang politisi

Gerindra ini.

Lebih lanjut, Fadli menerangkan, demokrasi sosial termaktub dalam politik berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi lokal, dan dalam ekonomi di bawah prinsip-prinsip koperasi dan penguasaan negara atas kekayaan alam. Demokrasi sosial menjamin kesejahteraan rakyat melalui kecukupan pangan, sandang, papan, jaminan kesehatan dan pensiun.

"Dalam menghadapi tantangan globalisasi, harus diterapkan prinsip multilateral yang efektif bagi Asia dan Eropa melalui penguatan demokrasi mengadopsi kearifan dan nilai-nilai lokal," tegasnya.

Setelah *Preparatory Meeting*, dilanjutkan dengan *Meeting of the Drafting Committee* untuk mempersiapkan Deklarasi The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting. Dalam *Drafting Committee*, Fadli Zon menyampaikan poin deklarasi dari Indonesia.

Selain itu, Fadli pun menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan, dan kesenjangan, baik antara negara-negara Asia dan Eropa, maupun di dalam masing-masing negara itu sendiri. Kita memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang terintegrasi, yang meliputi isu sosial, ekonomi, dan politik, termasuk alih teknologi antara kedua kawasan Asia dan Eropa. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan yang ada," ujar Fadli Zon.

"Alhamdulillah, semua negara yang hadir menyambut baik poin deklarasi dari Indonesia. Hari ini, keseluruhan deklarasi yang berasal dari berbagai negara akan dibacakan menjadi satu kesatuan yang utuh," pungkasnya. ■

(nt) Foto: Hamdis/hr



## DPR Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu di Sidang ICAPP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal itu disampaikan saat menyampaikan pidato di International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Sabtu, (23/04).

Dalam kapasitasnya sebagai legislator, menurutnya Indonesia sudah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilu tanpa mengurangi kualitas hasil yang didapat. "DPR telah berupaya mendorong efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, salah satunya dengan dilaksanakan pilkada serentak," ujar Fahri.

Efisiensi anggaran dalam pilkada dirasa sangat penting untuk mengurangi beban anggaran yang

terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak terpisah. Hal ini penting juga untuk mengimbangi kualitas fiskal dari masing-masing daerah yang berbeda.

Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien.

Pentingnya efisiensi anggaran disampaikan dan didorong dalam pertemuan trilateral antara ICAPP dengan The Permanent Conference of Political Parties of Latin America and the Caribbean (COPPPAL) dan Council of African Political Parties (ICAPP). ■



(Is), Foto: Rumi/hr

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

## Ketua DPR Sambut ICAPP 2016

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik pelaksanaan Konferensi Internasional Partai Politik se-Asia atau International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 yang berlangsung selama 3 hari sejak 22-24 April 2016 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam pidato pembukaan, Ade Komarudin menyambut baik kegiatan ini dan sebagai tuan rumah, dirinya mengaku senang. "Saya menyambut baik acara ini. Tentu saya selaku Ketua DPR sangat senang," ujar Akom, sapaan Ade Komarudin saat pembukaan pada Jumat, (22/04).

Akom menjelaskan bahwa pertemuan ICAPP ini akan melanjutkan perjuangan Konferensi Asia Afrika. Menurutnya, semangat Bandung sangat penting dalam

kelangsungan kehidupan dunia. "Pertemuan ini akan menjadi semangat mendasar bagi pertemuan-pertemuan selanjutnya," tuturnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menuturkan dengan penyelenggaraan ICAPP ini hubungan partai politik di Asia khususnya di Indonesia diharapkan akan terjalin semakin baik. Mengingat dalam rangkaian acara ini sebanyak 48 partai politik dari 32 negara turut ambil bagian dalam kegiatan tahun ini telah memasuki penyelenggaraan ke-26.

Dalam kesempatan itu, Akom menjelaskan bahwa Gedung DPR memiliki catatan penting dalam sejarah Pesta Olahraga Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Forces (Ganefo).

Menurutnya, Ganefo telah menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan olahraga. "Gedung ini salah satu besi pendiri bangsa ini. Gedung ini dibuat dengan istilah Ganefo kala itu, inilah yang menjadi dasar bagi pertemuan selanjutnya," jelasnya.

Selain itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa demokrasi bukanlah tujuan suatu bangsa, tetapi menjadi cara untuk mencapai tujuan berbangsa. Dirinya menjelaskan bahwa kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi tujuan berbangsa dan demokrasi tidak bisa asal diterapkan di suatu negara.

Hal-hal seperti budaya, adat dan situasi masyarakat harus diperhatikan terlebih dahulu. Demokrasi haruslah disesuaikan



dengan kriteria bangsa itu sendiri. "Demokrasi adalah sistem yang tidak bisa di *copy paste* di semua negara," jelas Kalla.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, telah terjadi perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan

hal itu, kata Kalla, tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang membutuhkan partai politik. "Karena demokrasi pondasi utamanya adalah partai politik, sehingga partai politik harus kuat di setiap negara untuk meningkatkan stabilitas sebuah



Ketua DPR Ade Komarudin berpidato dalam acara ICAPP 2016

bangsa," ujarnya.

Selain itu, Ketua Panitia Theo L. Sambuaga dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari berbagai negara yang hadir. "Malam ini, Bapak Andreas Pareira dan

saya, mewakili ketua umum partai kami masing-masing sebagai tuan rumah acara ini," ujar Theo.

Menurutnya, acara itu terlaksana berkat asas gotong royong. "Di acara ini, kita bersama berbasis-gotong royong dan bekerja bersama untuk melaksanakan acara ini. Karenanya kami menghargai semua parpol yang hadir di sini," jelas Theo.

Dalam acara ini, selain Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman dan mantan

Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri. Selain itu hadir pula petinggi dari 10 partai yang duduk di kursi DPR. Adapun delegasi dalam acara ini berasal dari perwakilan asosiasi partai politik dari Amerika Latin, Afrika dan Eropa. ■

(hs), Foto: Rumi/hr

## Indonesia- Selandia Baru Jalin Kerja Sama Pendidikan

Selandia Baru (New Zealand) jadi salah satu *partner* strategis Indonesia dalam mengembangkan kerja sama pendidikan. Program beasiswa, pertukaran pelajar, dan riset jadi salah satu program unggulan. Selandia Baru berkomitmen ingin membantu Indonesia lewat dunia pendidikan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Ketua Grup Kerja Sama Parlemen (GKSP) DPR RI dengan Selandia Baru, Firmandez (F-PG) bersama Ketua Indonesia Education Partnership Mr. Brook William Ross, Senin (25/4) di DPR. Brook mengungkapkan, setidaknya ada delapan universitas ternama di Selandia Baru yang siap menjalin kerja sama pendidikan dengan sejumlah universitas di Tanah Air.

Hadir mendampingi Firmandez, Sutan Adil Hendra (F-Gerindra) dan Ali Taher Parasong (F-PAN). DPR sendiri

menyambut baik sekaligus mengapresiasi Selandia Baru yang serius memberi bantuan beasiswa dan riset bagi para mahasiswa dan dosen di Indonesia. Dalam waktu dekat sudah akan terjalin kerja sama Selandia Baru dengan universitas di Jambi.

Dalam pertemuan itu, Brook mengungkapkan, ada program diskon biaya pendidikan S3 di Selandia baru hingga 80 persen, khusus bagi para mahasiswa Indonesia. Bahkan, para dosen yang ingin mengembangkan riset di Selandia Baru, akan segera difasilitasi. Program penguatan kurikulum perkuliahan di Indonesia juga akan dilakukan, agar sejumlah kampus di Indonesia bisa disejajarkan dengan kampus-kampus di Selandia Baru dan kampus internasional lainnya.



Anggota BKSAP Ali Taher Putra

Bantuan pendidikan juga akan digalakkan untuk kawasan Indonesia timur. Selama ini kerja sama pendidikan, kata Firmandez, lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Ali Taher putra asli NTT juga berharap agar bantuan pendidikan bisa sampai ke timur Indonesia. Hanya saja menurut Brook, mahasiswa dari Indonesia timur masih minim penguasaan bahasa Inggrisnya. Untuk itu, akan diberi bantuan pula berupa pelatihan bahasa, agar mahasiswa dari kawasan timur bisa bersaing dengan para mahasiswa dari Pulau Jawa. ■

(mh), foto: iwan/hr



## ICAPP ke 26 Hasilkan Deklarasi Jakarta

Peran partai politik menjadi hal yang paling disoroti dalam pelaksanaan International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) ke 26 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 22-23 April 2016.

Dari seluruh rangkaian acara tersebut menghasilkan Deklarasi Jakarta yang memuat beberapa rekomendasi untuk perbaikan peran partai politik di masa mendatang. Sebab peran partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat demokrasi. Tanpa parpol, demokrasi akan sulit diwujudkan dan sebaliknya demokrasi harus memberi ruang gerak bagi Parpol untuk berkembang.

Dalam ICAPP, seluruh delegasi sepakat ingin memperkuat demokrasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Kesepakatan yang termasuk dalam Deklarasi Jakarta antara lain berbunyi, "Peran utama dari partai politik adalah untuk memperkuat nilai demokrasi dan institusi di masyarakat kita dengan memegang prinsip *good governance* dan *rule of law*".

Seluruh delegasi ICAPP juga sepakat untuk memperkuat demokrasi, partai politik bisa menelurkan hasil yang konkret dan positif untuk menghapus kemiskinan dan perubahan iklim. Dua hal itu dianggap sebagai tantangan bagi dunia masa kini. Selain itu, Deklarasi Jakarta juga menyoroti fenomena perdagangan perempuan atau *woman trafficking* yang harus ditindak dengan tegas.

Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo

Pereira sekaligus sebagai *steering committee* ICAPP mengatakan pertemuan ICAPP ini merupakan momen berbagi pengalaman yang menarik dan bisa untuk mengidentifikasi masalah masing-masing dari seluruh partai politik di Asia untuk

manusia, kedaulatan, teritorial, integritas dan ekuitas semua bangsa non intervensi dalam urusan internal, penyelesaian damai, sengketa internasional, dan keadilan internasional," ujar Chung.

Di akhir penutupan acara, Megawati

Soekarnoputri selaku ketua umum dari partai politik yang menjadi *steering committee* menyampaikan beberapa hal diantaranya kolonialisme dan imperialisme. "Zaman memang telah berubah, tetapi kolonialisme dan imperialisme sejatinya hingga saat ini belum lenyap," ujar Megawati.

Menurut Presiden Indonesia

menyelesaikan bermacam persoalan untuk mencapai tujuan demokrasi, karena untuk mencapainya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dalam sidang ICAPP tersebut juga disimpulkan bahwa globalisasi harus dicapai dengan tetap melindungi dan mempromosikan keharmonisan, keberagaman, dan pluralisme. Dalam sidang tersebut, seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menumpas terorisme.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris ICAPP Chung Eui Yong menegaskan bahwa hasil konferensi ini adalah membangun komitmen untuk membangun semangat karakter bangsa dan bersatu untuk perdamaian internasional.

"Rasa hormat kami untuk Dasasila Bandung yang diadopsi pada tahun 1955 yang menekankan antara lain, hak asasi

kelima itu, nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme sudah menyusup masuk ke lingkaran perpolitikan melalui banyak pintu yakni isu finansial global, keterbukaan informasi dan teknologi, bahkan, masuk berupa kedok hukum internasional. "Dengan adanya beragam kondisi tersebut melahirkan kejahatan dalam sektor keuangan dan perbankan, narkoba, bahkan perdagangan manusia," paparnya.

Terkait rekomendasi terhadap isu perdagangan perempuan atau *woman trafficking*, Megawati menuturkan bahwa hal itu adalah kado bagi perempuan di Inonesia yang beberapa hari lalu baru saja memperingati Hari Kartini. "Ini merupakan hadiah bagi wanita Indonesia, karena pada tanggal 21 April yang baru saja berlalu, kami memperingati pahlawan emansipasi perempuan Indonesia, yakni RA Kartini," ujar Megawati. ■



Suasana sidang ICAPP 2016 di Gedung DPR





# Infrastruktur Bintan Harus Dibenahi

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyatakan infrastruktur di Bintan harus segera dibenahi untuk mendongkrak pariwisata di sana. Hal ini, mengingat banyak potensi wisata terutama wisata alam yang sangat indah.

"Semua yang ada di Pulau Bintan ini bisa dikemas dan dijadikan sesuatu hal yang sangat menjanjikan para wisatawan. Dan sebagai pemangku fungsi pengawasan, kami melihat masih ada hal-hal yang perlu dibenahi terutama infrastruktur," kata Sutan Adil Hendra saat pertemuan Tim Komisi X dengan Plt Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan jajarannya di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Sabtu (23/04).

"Infrastruktur saya rasa suatu masalah yang harus segera dibenahi guna mendongkrak pariwisata di Bintan ini. Disamping persoalan-persoalan regulasi lainnya," tegasnya.

Ia mengaku, Komisi X DPR RI selaku pengawas akan terus memantau potensi yang ada di Kepulauan Riau agar kedepannya bisa dimanfaatkan secara positif.

Luas Kepulauan Riau yang 95 persen laut ini, lanjutnya, tentu tidak akan cukup



Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra

Bintan," ungkap politisi dari Fraksi Gerindra ini. ■

kita kelilingi dalam satu atau dua hari. Namun demikian, kita lihat bahwa pulau dan laut yang dimiliki Kepulauan Riau ini adalah satu kesatuan potensi yang sangat menggembirakan bagi kita semua. "Termasuk kami terpesona dengan pantai Lagoi. Sehingga kita sadar bahwa selain Bali, kita memiliki Pulau

(sc), Foto: Suci/hr

## Komisi VIII Tinjau Proyek Embarkasi Haji Sumbar Yang Terbengkalai

**P**embangunan asrama haji embarkasi Provinsi Sumatera Barat yang saat ini terbengkalai merupakan proyek prestisius dengan serapan dana sebesar Rp 800 Miliar yang terletak di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi hanya berjarak kurang lima kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Demikian hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak kepada pers usai pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Jum'at (22/4).

Menurutnya, kedatangan Komisi VIII untuk merespon surat Bupati Padang Pariaman meninjau lokasi pembangunan asrama haji yang terbengkalai itu. "Ini bentuk pelayanan nyata anggota legislatif, sebetulnya apa kendalanya, ini kita akan mendalami," kata Deding.

Ia menambahkan, walaupun ada

kendala dan berbagai permasalahan yang terjadi, namun hal ini hendaknya dapat diselesaikan dengan baik, sebab asrama haji untuk keperluan umat.

Komisi VIII DPR akan membantu dan mencari solusi-solusi dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, baik solusi yuridis maupun bagaimana terkait dengan pembangunan asrama haji yang memang dinantikan oleh umat Islam Provinsi Sumatera Barat yang bisa untuk mengangkut jamaah haji dari tiga provinsi ini (Sumbar, Bengkulu, dan Jambi).

Lebih lanjut, kata Deding, bagaimana melakukan kelanjutan pembangunan asrama haji yang terbengkalai itu. "Ini penting sekali, pengawasan kita relatif efektif dan tentu saja menghasilkan sesuatu, nanti kita akan bahas bersama antara Komisi VIII DPR dengan



Tim Kunspek Komisi VIII tinjau proyek embarkasi Haji di Sumbar

Kementerian Agama terkait masalah ini," jelasnya.

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni membenarkan bahwa kedatangan Tim Komisi VIII DPR RI atas undangannya dalam rangka melihat kondisi pembangunan asrama haji tahap I secara langsung dan sekaligus melakukan evaluasi.

"Kita sangat berharap, Komisi VIII DPR RI dapat menganggarkan kembali pembangunan asrama haji di Kabupaten Padang Pariaman sampai selesai. Diharapkan, pada tahun 2017 asrama haji ini sudah dapat difungsikan," harap Bupati. ■

(lw), Foto: Iwan/hr



# Pembahasan RUU Tax Amnesty Untuk Kepentingan Ekonomi Nasional

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Komisi XI memastikan kalau pembahasan Rancangan Undang-undang ini dilaksanakan dengan pertimbangan hanya demi kepentingan negara. Meski beredar isu diberbagai media seolah-olah ada dana ratusan milyar yang beredar, yang mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan undang-undang tersebut di DPR.

"Kita membahas Undang-Undang ini untuk kepentingan negara, kita juga menekankan UU ini dilaksanakan demi kepentingan ekonomi nasional kita. Tidak saja demi kepentingan pemerintah saat ini, tetapi juga untuk pemerintahan selanjutnya," ucap anggota Komisi XI Johnny G. Plate.

Ia juga mengingatkan, bahwa terkait dengan RUU Tax Amnesty tersebut, ada suatu operasi yang membingungkan dan mengejutkan, tampaknya seperti ada dua



Anggota Komisi XI Johnny G. Plate

kubu yang sedang bertarung di lapangan, yakni yang pro *Tax Amnesty* dan yang kontra *Tax Amnesty*.

"Seolah-olah Komisi XI DPR sedang berada dalam situasi teror psikologis yang luar biasa, saya ingin mengingatkan ini secara sungguh-sungguh, bahwa kami membahas Undang-undang ini sepenuhnya hanya demi perekonomian bangsa dan negara. Kami menolak semua usaha-usaha taktis diluar diskusi formal dan argumentasi perdebatan dalam ruang rapat ini," tandasnya.

Komisi XI khawatir undang-undang ini akan 'layu sebelum berkembang'. Kalaupun nanti Undang-undang tersebut disetujui, dikhawatirkan akan menjadi UU yang lemah gemulai atau UU yang impotensi.

"Jangan berharap ada dana yang bisa masuk kalau dia lemah, karena ukuran dari UU ini bukan saja nanti untuk disahkan di paripurna bersama pemerintah, tetapi minimum 3 tujuan itu dapat kita capai," tegas Johnny.

Diantaranya yaitu *opportunity tax revenue* tahun 2016, dan kesiapan semua instrumen domestik termasuk sistem perpajakan.

"Dan di tahun berikutnya bisa peroleh intensifikasi dari perpajakan, melalui manfaat dari hal-hal yang telah dibahas, yaitu terjadinya repatriasi, meningkatnya likuiditas domestik yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri, baik melalui pembiayaan-pembiayaan proyek atau surat hutang negara untuk proyek pemerintah," pungkasnya.

Menurut Johnny G. Plate, ada beberapa hal yang ingin di diskusikan Komisi XI dengan pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan, dan BKPM yakni khususnya dalam rangka kaitannya dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, dan kekuatan stabilitas mikro ekonomi.

"Kalau ini tidak bisa kita jaga dengan baik, mungkin dengan masuknya repatriasi, ini akan memberikan dampak-dampak negatif, diantaranya bagaimana dana-dana itu bisa diarahkan untuk masuk menjadi aset-aset yang produktif," ujar Johnny. ■

(dep.mpi), Foto: Arief/hr

## Komisi X Dukung Percepatan Pengembangan Wisata Pulau Sabang

Komisi X DPR RI mendukung percepatan pengembangan pariwisata di Pulau Sabang sebagai salah satu destinasi yang dipromosikan Kementerian Pariwisata di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Komisi X ke Pulau Sabang, Aceh, Jumat (22/4).

"Kami melihat Pulau Sabang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit bagi

wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Seperti yang tadi kita lihat bersama, tugu Nol Kilometer yang merupakan salah satu tugu yang populer di Indonesia karena letaknya di paling barat Indonesia. Apalagi pengunjung juga mendapat sertifikat setelah berkunjung ke tugu tersebut. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan," ungkap Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya.

Tidak hanya itu, politisi dari fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung Kementerian Pariwisata mengajak lintas kementerian untuk mendukung BPKS atau Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dalam percepatan pengembangan kawasan tersebut.

"Percepatan pengembangan pariwisata Sabang tidak hanya mengandalkan BPKS saja, namun juga kementerian lainnya seperti Kementerian



Tim Kunspek Komisi X DPR meninjau wisata Pulau Sabang

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, kami mendukung penuh Kementerian Pariwisata untuk mengajak lintas kementerian dalam percepatan pengembangan pariwisata di sabang," jelas Riefky, begitu ia biasa disapa.

Pada kesempatan itu Tim Kunjungan Komisi X yang terdiri dari Isma Yatun, Noor Achmad, Dwita Ria Gunadi, Sri Melyana, Dedi Wahidi, Latifah Shohib,

PU (pekerjaan umum) untuk pembangunan infrastruktur, serta Dadang Rusdiana dan Venna Melinda juga meninjau Pantai Iboih, Pulau Rubiah yang

berjarak tidak jauh dari tugu Nol Kilometer. Melihat keindahan wisata alam di Pantai tersebut, Riefky yang menjadi Ketua Tim kunjungan kerja berharap Kemenpar, dan BPKS untuk lebih kreatif lagi dalam membuat wisata buatan di wilayah tersebut. Hal tersebut untuk menunjang wisata alam yang ada.

"Pantai disini sangat indah, tidak kalah dengan daerah lain seperti Bali, namun tentunya disini dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam membuat wisata buatan seperti *jet ski, banana boat, paraciling* yang ikut mendukung wisata alam yang ada dan menjadi daya tarik bagi wisatawan," pungkasknya. ■

(Ayu), Foto: Ayu/hr

## Isu Pembangunan Berkelanjutan Perlukan Peran Parpol

Dalam rangka penguatan peran parlemen dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Norwegia. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam peran parlemen di dalam tahap implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah disepakati pada bulan September 2015 yang lalu dan indikator tujuan disepakati pada bulan Maret 2016 lalu.

Kunjungan kali ini juga memiliki fokus untuk memperdalam bagaimana parlemen dapat berkontribusi lebih banyak dalam tahap implementasi SDGs terutama di dalam dimensi pembangunan ekonomi hijau.

"Norwegia yang merupakan salah satu negara terdepan dalam memajukan isu-isu pembangunan berkelanjutan, terutama di dalam permasalahan lingkungan. Hubungan antara Indonesia dan Norwegia yang sudah terjalin sejak lama sudah berevolusi dari perdagangan menjadi *partner* yang membangun kerjasama yang *mutual*. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang lingkungan seperti REDD+ (*Reducing Emission from Degradation and Deforestation*) and juga kerjasama maritim di bidang IUU (*Illegal,*

*Unreported and Unregulated*) fishing", papar Ketua Panitia Kerja SDGs, Nurhayati Ali Assegaff.

Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Nurhayati Ali Assegaff (F-PD) dengan anggota delegasi Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (FPDIP), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Siti Hediati Soeharto (F-PG), Muhammad Syarifudin (F-PAN), Sofwatillah Mohzaib (P Demokrat), Siti Masrifah (F-PKB), Kartika Yudhisti (F-PPP), Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra, Hamdhani (F-Nasdem), dan Arief Suditomo (F-Hanura)

Dalam pertemuan dengan parlemen Norwegia (Stortinget), anggota Panja SDGs berkesempatan diskusi mengenai keterlibatan parlemen di dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan Ketua Parlemen, Mr. Olemnic Thomessen. Perlu diketahui bahwa seluruh partai politik yang ada di Norwegia akan menghadapi pemilihan umum dan sedang menyusun program kerja, diantaranya isu-isu pembangunan berkelanjutan secara nasional dan daerah diangkat.

Partai-partai politik di Norwegia juga secara kolektif sering menginisiasi debat dan mengadakan *workshop* mengenai



Kunjungan kerja Tim Panja SDGs BKSAP ke Norwegia

pembangunan berkelanjutan di daerah pilihan. "Proses untuk memperkenalkan SDGs kepada publik seharusnya dimulai dari perubahan paradigma partai politik itu sendiri. Sudah selayaknya parlemen dan seluruh jajaran di partai politik mengerti tentang permasalahan pembangunan berkelanjutan", ujar Mr. Olemnic Thomessen.

Ketua parlemen Norwegia juga terkesan dengan keberadaan Panja SDGs yang sudah berperan aktif di dalam mendorong pembentukan Komite Bersama dan memberikan rekomendasi tahunan kepada pemerintah dan DPR RI mengenai langkah-langkah yang dapat diambil bersama-sama untuk sukseskan SDGs.

Dalam kesempatan ini, Ketua Panja juga mengundang Ketua Parlemen, Mr. Olemnic Thomessen untuk hadir ke *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang akan diadakan pada bulan September 2016 mendatang di Nusa Dua, Bali. ■

(bksap, mp), Foto: dok.BKSAP/hr



## Komisi IV Tinjau Balai Taman Nasional Bali Barat

DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) untuk dilakukan penyempurnaan atau perubahan.

"Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat beberapa permasalahan, sehingga perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," ujar anggota Komisi IV DPR Daniel Johan (F-PKB) saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IV dengan Bupati Jembrana, Dirjen PJLKH, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat, Kepala Dishut Provinsi Bali, di Balai Taman Nasional Bali Barat, Selasa (26/4).

Sehubungan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, jelas Daniel, Komisi IV telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain kajian awal tentang perkembangan peraturan KSDAE baik nasional maupun internasional terutama Protocol Nagoya dan Cartagena.

Selain itu, melakukan penelitian lapangan dan menggelar *forum discussion group* (FGD) dengan *stakeholder* terkait, termasuk dengan Kementerian LHK, KKP, Kementan dan Kemenkumham. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan pakar konservasi dari IPB, Unpad dan ITB.

Berikutnya, melakukan kunjungan ke IUCN (*International Union for Conservation of Natural Resources*) dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora*) di Geneve Swiss yang didampingi Staf Khusus Menteri LHK. Komisi IV juga



Tim Kunspek Komisi IV meninjau Balai Taman Nasional di Bali

melakukan penyusunan draft RUU atas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Politisi dari Fraksi PKB mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali adalah dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan legislasi DPR RI untuk menambah atau memperkaya wawasan dan pengetahuan dari lapangan khususnya Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai objek yang dikunjungi.

Lebih jauh Daniel ingin mendapatkan penjelasan dan melihat langsung program atau kegiatan konservasi terhadap pengelolaan Taman Nasional secara insitu. Kemudian perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) utamanya satwa endemik burung Jalak Bali atau Curik Bali, yang saat ini sudah dikategorikan sebagai burung langka dan dilindungi, masuk dalam kategori IUCN *Red List* serta didaftarkan dalam CITES Appendix I, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan.

Sementara Kepala Balai TNBB, Tedi Sutedi menjelaskan bahwa pada saat ini TNBB merupakan tempat perlindungan bagi kelangsungan atau keberadaan burung Jalak Bali (Curik Bali). Upaya

pelestarian yang telah dilakukan antara lain adalah dilakukannya pelepasliaran burung Jalak Bali di habitat alaminya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa penyangga (penangkaran burung), pembinaan habitat dengan pengendalian jenis tanaman invasif, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pengembangan teknologi, serta disusun rencana grand desain pelestarian Curik Bali.

Terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi, Tedi menjelaskan bahwa TNBB baru ditetapkan tahun 2014 terutama kawasan perairan, perlu sosialisasi tingkat tapak untuk sinkronisasi penataan ruang dan wilayah dengan para pihak. Selanjutnya, upaya yustisi terhadap pelanggaran tindak pidana kehutanan diperairan TNBB yang tidak optimal dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, peralatan dan anggaran. Kemudian pinjam pakai kawasan yang telah habis masa berlaku namun belum *clear and clean* yang melibatkan banyak instansi yang memanfaatkan kawasan TNBB yang tidak sesuai dengan regulasi di Kementerian LHK saat ini.

Tedi menambahkan, adanya peraturan pengenaan pajak yang tumpang tindih dalam rangka menjamim iklim investasi wisata alam dikawasan konservasi, misalnya pengenaan pajak bumi bangunan di dalam kawasan hutan yang juga pihak investor telah dikenakan PNBP dari izin IPPA.

"Upaya pemecahan masalah tersebut, kami telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, LSM dan *stakeholder* lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan TNBB ini," pungkasnya. ■



## Ketua BKSAP Terima Dubes Uzbekistan

**K**etua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan Shavkat Jamolov pada Selasa, (26/04) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, beberapa hal menjadi topik pembahasan seperti perkembangan infrastruktur, kebudayaan serta peningkatan kerja sama antar kedua negara.

Nurhayati menuturkan kunjungan ini sebagai upaya silaturahmi antar kedua negara dalam meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. "Kunjungan Dubes Uzbekistan untuk silaturahmi antara dua negara. Tentunya ini sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong agar hubungan antar kedua negara ini tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga antar parlemen, sehingga bisa mempererat kedua negara. "Tadi yang kami bahas adalah hubungan antara dua negara agar tidak hanya antara pemerintah dengan pemerintah tapi juga parlemen dengan parlemen, yang mana dalam era demokrasi, wakil rakyat menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Menurutnya, Uzbekistan merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim, sama seperti Indonesia. Sehingga, memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Duta besar juga berharap karena banyak tempat makam bersejarah dalam kebudayaan Islam, seperti makam Imam Al Bukhari, serta wisata religi lainnya.

Bagi Nurhayati, hubungan antara

kedua negara ini perlu ditingkatkan karena Uzbekistan memiliki wisata religi yang cukup banyak dalam khazanah Islam terutama kerjasama *people to people*. "Kita berharap hubungan ini bisa ditingkatkan, agar masyarakatnya juga bisa saling kunjung-mengunjungi. Karena di Uzbekistan banyak tempat wisata religi seperti makam Imam Bukhari," terangnya.

Dalam pertemuan ini, Shavkat



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf berdialog dengan Duta Besar Uzbekistan

menginginkan agar masyarakat Indonesia mengetahui lebih dalam tentang Uzbekistan dan berkunjung kesana. Menanggapi itu, Nurhayati juga berkeinginan agar Uzbekistan sebagai negara dengan kawasan strategis memiliki peran untuk mempromosikan Indonesia ke negara-negara sekitar.

"Shavkat menginginkan agar masyarakat Indonesia mengerti tentang Uzbekistan dan berkunjung kesana. Sebaliknya, kita juga berharap karena Uzbekistan ini letaknya juga sangat strategis maka kita juga ingin Uzbekistan sebagai tempat untuk mempromosikan Indonesia ke negara sekitarnya," terang Nurhayati.

Terkait dengan kerjasama antar parlemen, Nurhayati menjelaskan

bahwa DPR sudah melakukannya berkali-kali. Misalnya ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon datang ke Uzbekistan beberapa waktu lalu sebagai *observer*.

"Tentunya kita akan meningkatkan kerjasama itu, misalnya ketika Pak Fadli beberapa waktu lalu datang ke Uzbekistan sebagai *observer* pemilu," jelasnya.

Selain itu, DPR juga telah meningkatkan hubungan bilateral ketika menghadiri forum-forum internasional serta mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan dan kebudayaan.

"Ketika di forum internasional kita sering melakukan kerjasama bilateral. Yang kita dorong adalah kerjasama antara *people to people* agar antar masyarakat di kedua negara mengenal. Kita juga ingin meningkatkan kerjasama seperti pendidikan dan kebudayaan. Itu yang tadi kita bicarakan," jelasnya.

Terkait dengan upaya peningkatan kerjasama, Nurhayati menjelaskan bahwa BKSAP dalam waktu dekat juga akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Uzbekistan. Dirinya juga berkeinginan untuk bertemu dengan *key person* disana agar kunjungannya bisa menjadi lebih bermanfaat.

"Kita akan segera ada Kunspek dari BKSAP, hal ini dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral tadi. Selain ke Uzbekistan, juga akan mengunjungi Kyrgistan. Kita ingin bertemu dengan *key person* agar kunjungannya menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara," pungkasnya. ■



## Komisi VI Selidiki Pelanggaran Tender di PLN

Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI dalam rapat dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penyelidikan dan evaluasi atas kinerja lembaga ini, Selasa (26/4). Panja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra.

Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijana mengungkapkan, dalam pelaksanaan tender di lingkungan PLN ada pelanggaran aturan. Dia membeberkan, ada salah satu peserta tender di PLN



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana

yang tidak memenuhi syarat namun tetap diloloskan oleh oknum di dalamnya.

"Jadi ada yang kita temukan, bahwa salah satu peserta tender itu tidak memenuhi syarat pada sampul satu tetapi diloloskan, sehingga sampul duanya dibuka. Padahal menurut dokumen tidak boleh, kalau tidak lolos tidak bisa dibuka," ungkap Azam.

Atas dasar penemuan pelanggaran itulah Komisi VI DPR membentuk Panja PLN. Menurut Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur III ini, Komisi VI tidak bisa membiarkan permasalahan ini berlarut-larut tanpa evaluasi, karena pengawasan kepada BUMN adalah tanggung jawab Komisi VI.

"Oleh karena itu kita buat Panja. Kalau tidak kita buat Panja, tidak kita evaluasi artinya kita melupakan pembeneran," tegas Azam.

menjelaskan jika dalam proses pelelangan di lingkungan BUMN tidak transparan dan mengarah pada persekongkolan yang tidak sehat maka tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang KPPU.

Azam melanjutkan, BUMN adalah aset negara, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003. Oleh sebab itu jika BUMN dirugikan oleh oknum-oknum yang melakukan pelanggaran aturan maka, dia menuding hal tersebut adalah korupsi.

"Maka itu adalah bagian daripada korupsi, sebab negara yang seharusnya tidak mengeluarkan uang, harus mengeluarkan uang lagi," tukas Azam.

Azam mengharapkan kinerja PLN bisa lebih baik, karena jika tidak ada perbaikan di PLN maka otomatis akan berdampak langsung kepada rakyat.

"Supaya negara tidak dirugikan, rakyat tidak dirugikan, PLN menjadi bagus, pengawasan kita menjadi lebih enteng. Kalau menjadi berat kan habis energi dan waktu kita," sambat Azam. ■

(foto), Foto: iatca/hr

## Panja Pengupahan Terima Masukan Terkait PP 78

Panja pengupahan mengapresiasi masukan KSPSI dan KSPI terkait PP 78 tahun 2015, yang dikeluarkan pemerintah berbarengan dengan paket kebijakan ekonomi ke-4. Semua masukan akan menjadi pandangan Panja Pengupahan dalam menyusun rekomendasi.

"Dari masukan ini kami mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah ini berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi pasti harus dilakukan peninjauan atau evaluasi, saat ini komisi IX sedang mengumpulkan dulu masukan-masukan terkait PP 78 sebelum memberikan rekomendasi ke pemerintah," ujar Ketua Komisi IX, Dede Yusuf usai rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Lebih lanjut, politisi F-partai Demokrat ini mengatakan beberapa yang harus di revisi pada PP 78 salah satunya mengenai

sanksi, karena dalam PP 78 tidak disebutkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat struktur skala upah.

"PP 78 ini juga perlu di revisi karena keluar dari UU No. 13, yang tidak lagi melibatkan serikat buruh dalam merundingkan

skala upah atau yang biasa dikenal dengan tripartit, apapun yang keluar dari UU memang perlu di revisi "tegasnya.

Sementara, Ketua KSPI, Kusmih berpendapat PP nomor 78 tahun 2015 khususnya pasal 44 ayat 2 harus dicabut oleh pemerintah melalui panja pengupahan yang di bentuk oleh komisi IX DPR RI.

"Kemudian setelah dicabut memanggil tripartit nasional, yang di dalamnya terdapat unsur serikat buruh, unsur pengusaha dan tentu pemerintah pusat



Ketua Komisi IX Dede Yusuf bersama KSPSI dan KSPI

dalam hal ini Kemenaker untuk membentuk tim dalam membahas kembali peraturan pemerintah tentang upah yang lebih komprehensif dan lebih akomodatif dan mengembalikan hak berunding serikat buruh,"tegasnya.

"Kita tidak berbicara nilai, kita tidak berbicara nominal, tetapi kita berbicara mengenai mekanisme dan sistem berunding yang menerapkan sistem skala upah. Kami juga meminta diberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan struktur skala upah,"tambahnya. ■

(rmm), Foto: Jayadi/hr



# Badan Keahlian Dewan Terima Mahasiswa Universitas Podomoro

**K**epala Badan Keahlian Dewan (BKD) Johnson Rajagukguk menerima mahasiswa Universitas Podomoro, Fakultas Hukum Bisnis, di ruang kerjanya, Gedung Setjen, Jakarta, Selasa (26/4). Kedatangan mahasiswa ini untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana peran BK Dewan terhadap DPR.

"Ini bagus, kami terus mendorong hal ini agar masyarakat terutama perguruan tinggi tahu dan paham bahwa DPR itu ada yang namanya BK Dewan yang berperan memberi dukungan terhadap tiga fungsi dewan yaitu, pengawasan, legislasi dan anggaran," jelas Johnson.

Lebih lanjut ia menjelaskan, BK Dewan memiliki staf dalam melaksanakan tugas, pertama di perancangan undang-undang, kedua pusat kajian anggaran, ketiga pusat kajian akuntabilitas, keempat pemantauan



Kepala BKD Johnson Rajagukguk bersama mahasiswa Universitas Podomoro

pelaksanaan undang-undang, dan pusat penelitian. Dirinya berharap dengan dibentuknya BK Dewan dapat memperkuat sistem kerja DPR.

"Kewenangan BK Dewan penting, karena menurut saya tidak ada parlemen di dunia ini yang kuat tanpa dukungan, nah kita sudah mempunyai gagasan bahwa

dukungan keahlian itu seharusnya dimulai dari tahun 80 an, terutama setelah reformasi maka semakin penting lagi, karena kekuasaan sekarang ada di DPR jadi sistem dukungannya harus semakin kuat,"harapnya.

Sementara itu, dalam keterangannya, Marcell selaku perwakilan mahasiswa Podomoro mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Keahlian Dewan karena telah menerima mereka.

"Kami senang, karena keingintahuan kami tentang BK Dewan terjawab mulai dari bagaimana penyusunan undang-undang, kenapa harus ada studi ke luar negeri dalam menyusun UU sudah terjawab semua dan apa yang diinginkan bisa diketahui,"tuturnya. ■

(mm), Foto: Kresno/hr

## Komisi IV Tinjau Lokasi Program Cetak Sawah di Sulsel

**K**omisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan, guna meninjau langsung program cetak sawah yang sedang digalakkan oleh Pemerintah. Dalam peninjauan di salah satu lahan sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, beberapa Anggota Komisi IV mengkritisi persiapan cetak sawah itu.

"Banyak pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR, yang belum meyakini apakah pencetakan sawah ini bisa digunakan. Namun Kepala Dinas Pertanian sudah meyakinkan bahwa sawah ini bisa digunakan," kata Ketua Tim Kunspek sekaligus Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (F-Gerindra) di Pinrang, Sulsel, Selasa (26/4).

Kabupaten Pinrang mendapat jatah untuk mencetak sawah seluas 1000 hektar, dari total target 200 ribu hektar cetak sawah oleh Pemerintah di seluruh Indonesia selama tahun 2016. Edhy memastikan, pihaknya akan melakukan pengawasan

terhadap pencetakan sawah ini, agar sesuai dengan ketentuan.

"Ini salah satu bentuk pengawasan kita. Jangan sampai setelah sekian tahun berjalan, baru kita cek lagi. Kita cek dari awal, dari pengesahan anggaran, kemudian proses persiapannya, sehingga kalau ternyata ada kesalahan, bisa kita perbaiki," pasti politisi asal dapi Sumatera Selatan itu.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR Muhammad Nasyit Umar (F-PD) mengkritisi persiapan pencetakan sawah ini yang dinilai belum sesuai harapan. Ia menilai, pematang sawah belum disiapkan dengan baik. Gambaran mengenai luas sawah belum didapatkannya dengan lengkap.

Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Muh Darwis Bastama mengatakan, luas areal pertanian di Pinrang mencapai 53 ribu hektare, adanya hambatan saat musim panen disebabkan akibat curah hujan tinggi disertai rebahnya padi kemudian diperparah kurangnya mobil alat pemanen.



Tim Kunspek Komisi IV meninjau pencetakan lahan sawah baru di Kabupaten Pinrang

"Jadi kendanya, luas areal sawah tidak sebanding dengan mesin pemanen yang hanya 220 unit, sementara pencetakan sawah baru berkisar 1000 hektar memerlukan perhatian khususnya perbaikan infrastruktur penunjang di sekitar lahan," kata Darwis.

Selain meninjau lokasi program cetak sawah, Tim Komisi IV DPR juga menggelar pertemuan dengan perwakilan petani, dan meninjau Bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IV DPR, diantaranya Rahmat Handoyo (F-PDI Perjuangan), Azhar Romli (F-PG), Saniatul Lativa (F-PG), OO. Sutisna (F-Gerindra), Andi Nawir (F-Gerindra), Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), dan Sa'duddin (F-PKS). ■

(sf), foto : sofyan/hr



## Komisi VIII Apresiasi BPBD Bali berikan 33 Hotel Tersertifikasi Siaga Bencana Tsunami

**K**omisi VIII DPR RI mengapresiasi keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provisi Bali yang telah memberikan sertifikat bagi 33 hotel yang siap melakukan penanggulangan bencana tsunami, sebagai inisiator sekaligus contoh nasional dalam mengatasi dan mengantisipasi bencana tsunami.

Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke BPBD Provinsi Bali. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan dia mengapresiasi program yang di kembangkan BPBD Prov. Bali yang memberikan sertifikat bagi 33 hotel yang siap melakukan penanggulangan bencana tsunami, ini harus di contoh oleh provinsi yang ada di Indonesia, kunjungan ini juga untuk melihat sejauh mana kesiapan BPBD Bali mengantisipasi dan mengatasi bencana di Provinsi Bali.

Usai pertemuan tim kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR langsung melihat fasilitas pemantau Tsunami Indonesia *Tsunami Warning System (Ina-TEWS)*, juga

meninjau gudang penyimpanan logistik BPBD Bali, dan mendatangi Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami di jalan Tukad Penataran, Kelurahan Serangan, Desel-Bali, Jum'at, (22/4).

Dalam pertemuan tersebut Kepala BPBD Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan "Hotel yang ada di kawasan resiko bencana tsunami dan bangunannya memiliki ketahanan gempa diharapkan menjadi tempat evakuasi sementara. Terutama hotel yang tidak ada tempat ketinggian atau perbukitan, misalnya di Kuta, kalau ada tsunami mau lari ke mana?" katanya.

"Untuk itu kita fasilitasi BPBD dengan desa adat setempat, mereka melakukan kerjasama (MOU) kepada 33 hotel yang sudah tersertifikasi," tambahnya.

Sertifikasi yang diberikan oleh BPBD



Pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII dengan BPBD Bali

Provinsi Bali kepada 33 hotel merupakan dokumen formal untuk menyatakan bahwa hotel itu memiliki kesiagaan yang baik terhadap bencana, seperti kondisi fisik bangunannya, pengetahuan tentang bencana baik manajemen hotel maupun karyawannya, kesiapsiagaan dalam upaya mitigasi, dan keamanan.

Dengan demikian, ungkap Dewa, tamu hotel dan wisatawan tidak takut dengan Bali yang memang katagori daerah rawan bencana, sehingga wisatawan tetap merasa aman dan nyaman serta waspada. ■

(man) Foto: Andri/hr

## Kebutuhan Mendasar Daerah Wisata Dipenuhi Sebelum Dipasarkan

**W**akil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mendesak pemerintah agar kebutuhan mendasar destinasi wisata dipenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan. Khusus di Karimunjawa, kebutuhan mendasar itu adalah listrik, air dan BBM serta dermaga maupun bandar udara.

Hal itu diutarakannya di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Karimunjawa Jumat (22/4). Di kepulauan yang masuk wilayah Kabupaten Jepara ini, listrik baru 16 jam, air bersih sulit, pompa bensin belum ada serta dermaganya sangat kecil.

"Kita mengalami dengan kapal besar, mau sandar saja susah. *Airport run* waynya pendek. Kalau Karimunjawa mau dijadikan salah satu *centrum* destinasi, maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi," tegasnya.

Setelah mendengar paparan dari Dinas Pariwisata Jareng dan petugas Badan Pengelola Taman Wisata Karimunjawa, apa yang dipasarkan belum jalan. Meski ada *snorkeling*, *diving* tetapi tidak cukup, harus ada penunjang kehidupan lain. Orang pergi wisata menginginkan dengan uang yang dikeluarkan benar-benar bisa rileks.

Apalagi lanjutnya, program Presiden

Jokowi pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bahkan setelah 2020 nanti sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itu sejak APBN-P 2015 dan 2016 DPR telah menyetujui peningkatan anggaran yang cukup besar baik di Kemenpar dan Badan Ekonomi Kreatif.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, perlunya kapal cepat untuk mengangkut wisatawan ke Karimunjawa. "Kita sendiri mengalami, hampir 10 orang muntah-muntah Kita butuh kapal cepat, transportasi juga harus siap. Ini kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pariwisata saja," jelasnya.





# Dewan Apresiasi Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian

**K**omisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) yang telah memberikan penjelasan mengenai industri *smelter* di Indonesia.

"Kami memberikan apresiasi kepada AP3I yang ternyata telah menunjukkan kepada kita semua bahwa membangun *smelter* itu sangat mungkin dan bisa serta tidak perlu investasi yang terlalu besar," kata Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung saat menutup Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso dan jajarannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/04)

Menurut penjelasan AP3I, kata Tamsil, pembangunan *smelter* mungkin tidak murah-murah amat, tapi tidak perlu membayangkan sampai sekian milyar dollar. "Tapi tadi dijelaskan bahwa hanya 130 juta dollar. Untuk di Gersik itu memerlukan 2 - 3 milyar. Ini yang membuat seolah-olah sangat berat untuk membangun *smelter*, ini sangat mungkin," jelas politisi Fraksi PKS ini.

Menurutnya, Komisi VII telah mendapat

gambaran bahwa dengan nilai tambah yang dimiliki setelah diolah ini menjadi lebih besar. Sehingga sesungguhnya lebih menguntungkan. Mestinya tidak menghindari untuk pembangunan *smelter* itu.

"Dalam rangka untuk menyetop ekspor *ore* (mineral mentah) dan perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membangun, maka saya kira asosiasi ini bisa memikirkan itu sebagai asosiasi yang memang secara khusus untuk membangun *smelter* untuk menampung dari perusahaan-perusahaan tambang yang lain," tegas Tamsil.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso mengharapkan kepastian sumber bahan baku/*raw* material atas mineral, karena beberapa anggota AP3I masih kesulitan memperolehnya.

Ia menyatakan, pemberian ijin ekspor kepada perusahaan yang belum memiliki pengolahan dan pemurnian dapat menyebabkan berkurangnya *raw* material



Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung

konsentrat yang akan bisa ditampung oleh industri yang sudah ada.

Selain itu, Prihadi menjelaskan ada tumpang tindih kewenangan ijin pengawasan dan pembinaan secara hukum antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Di sektor perpajakan, lanjut Prihadi, banyak sekali interpretasi yang dibuat Kementerian Keuangan yang menurutnya tidak adil terhadap industri-industri dalam negeri yang dibangun atas modal sendiri. Ia mengharapkan Kementerian Keuangan lebih pro pada industri dalam negeri.

Sementara di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, ia mengharapkan ada interaksi yang baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan industri *smelter*. AP3I memohon Komisi VII DPR RI bisa mengedepankan masalah ini.

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) merupakan perwujudan nyata dari implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2014 dalam peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. AP3I didirikan 20 Mei 2015, beranggotakan 23 perusahaan industri pengolahan dan pemurnian mineral, ferro dan nonferro. AP3I merealisasikan investasi sebesar USD 12 milyar dengan memperkerjakan kurang lebih 15.000 tenaga kerja (tidak termasuk kontraktor).

AP3I didirikan bertujuan menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan kemandirian sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral logam. ■

(sc). Foto: Jaka/hr



Tim Kunspek Komisi X meninjau Pulau Karimunjawa

Khusus Karimunjawa, Utut Adianto berharap perlunya masalah koordinasi. "Menteri pernah ngomong belum dengan Gubernur Jateng dan Bupati Jepara, mau dikemanakan Karimunjawa. Kalau menteri

Mujib Rohmat (FPG), Moreno Soepranto dan Nuroji (F Gerindra), Jefirtson R. Riwu Kore (FPD), Laila Istiana (FPAN), Elviana (FPP) dan Ferry Kase (F Hanura). ■

(mp). Foto: Mastur/hr



## Endang Srikarti Gelar Pasar Murah di Tiga Desa

Satu per satu warga yang mendapatkan sembako murah menampakkan kebahagiaannya. Inilah yang terlihat dari masyarakat di tiga desa saat Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani menggelar pasar murah. Tiga desa itu berada di dua kabupaten dan satu kota di Jateng.

Lewat pasar murah ini, Endang ingin tetap menjaga kedekatan sekaligus memberdayakan masyarakat di dapilnya agar lebih sejahtera. "Saya tidak ingin masyarakat saya terangkat harga diri dan martabatnya dengan pasar murah ini," ucap Endang, Minggu (24/4), di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo.

Selain menggelar pasar murah, Endang juga sekaligus memberikan vaksin anti-influenza secara gratis kepada masyarakat setempat yang bekerja sama dengan Bio Farma. Sementara itu, materi sembako yang dibagikannya pada perhelatan pasar murah terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Bersama BRI, Endang menjalin kerja sama untuk menggelar pasar murah kali ini.

Sebelumnya, pada Sabtu (23/4), pasar murah dan pemberian vaksin anti-influenza juga digelar di dua titik, masing-masing di Desa Jimbung, Kalikotes, Kabupaten Klaten dan Desa Kalangan, Klego, Kabupaten Boyolali. Sembako tersebut dijual murah hanya dengan harga Rp40.000. Di pasaran, dengan materi sembako tersebut, harganya bisa mencapai Rp80.000.

Miskiatur warga Desa Sedayu, Boyolali yang turut mendapatkan sembako murah berkomentar, harga sembako yang didapatkannya sangat murah. Jauh lebih murah daripada harga yang biasa ibu muda ini beli di pasar. "Saya berharap sering-sering diadakan pasar murah seperti ini. Saya sendiri baru mengenal Ibu Endang di sini," akunya, bahagia.

Hal senada disampaikan pula oleh dua ibu sepuh yang ikut mengantri mendapatkan sembako murah. Keduanya adalah Ngadinem dan Jamilah, dua warga



Anggota Komisi VI Endang Srikarti Handayani membagikan sembako murah

Jimbung, Klaten. Keduanya, mengaku baru kali ini mendapat sembako murah dan senang bisa bertemu langsung dengan Endang Srikarti, politisi Partai Golkar dari dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali).

"Hasil penjualan dari pasar murah ini disumbangkan untuk percepatan pembangunan ekonomi di Boyolali, Solo, Klaten, dan Sukoharjo. Contohnya, di Desa Jimbung, Klaten, hasil penjualan pasar murah ini ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kemasan air bersih dan air minum," papar anggota Komisi VI itu. ■

(mh), Foto: Husen/hr

## DPR Minta Menteri KKP Tinjau kembali Permen No.1 Tahun 2015

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khairon saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau kembali peraturan Menteri KKP No. 1 dan 2 tahun 2015 mengenai pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan juga pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik serta lebih memperhatikan nasib nelayan dan pembudidaya kepiting di seluruh daerah di Indonesia.

"Ibu (Susi Pudjiastuti-red) harus meninjau kembali peraturan pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan

rajungan karena menyulitkan nelayan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khairon saat meninjau tempat lokasi budidaya kepiting dan rajungan di Tanjung Widura Kec. Bungah, Kab. Gresik, Rabu (27/04).

Lebih lanjut, Herman mengatakan, saat kunjungan kerja Komisi IV DPR Tanjung Widura, seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan solusi bagi para nelayan dan pembudidaya kepiting, lobster dan rajungan. Hal ini menurut Herman, diketahuinya saat tim kunjungan melakukan dialog langsung dengan kelompok nelayan kabupaten Gresik yang

mengajukan keberatan tentang aturan permen No. 1 tahun 2015 yang dikeluarkan KKP, dimana mereka meminta solusi dari dampak peraturan tersebut.

Ia menuturkan, sudah banyak nelayan yang telah menangkap kepiting, tetapi hasil panen tersebut sekarang praktis tidak bisa diapa-apakan karena ada larangan hasil peraturan KKP tersebut dan harga jual dipasaran sangat murah.

Berdasarkan Permen tersebut, penangkapan lobster (*Panulirus sp*) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas delapan sentimeter, kepiting (*Scylla spp*) dengan ukuran lebar karapas



## Baleg Setujui RUU PIHU

**B**adan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU yang merupakan usul inisiatif Komisi VIII ini dinilai sangat relevan karena didalamnya diatur transparansi, proporsionalisme dan jaminan untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik.



Suasana penandatanganan persetujuan RUU PIHU di Ruang Baleg

"Sistemnya saling terintegrasi sehingga setiap input yang kita dapatkan ada salurannya, misalnya jika ada komplain peserta terhadap penyelenggara Ibadah Haji bisa langsung dilaporkan kepada Majelis Amanah Haji (MAH) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 RUU PIHU," jelas Ketua Panja Baleg Totok Daryanto dalam Rapat Pleno Baleg dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/04).

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo tersebut juga disampaikan, peran setiap pihak

dengan tegas dibedakan antara pihak yang membuat aturan (regulator), pelaksana, dan pengawas haji. "Menteri Agama sebagai regulator, Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) sebagai pelaksana, dan Majelis Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas sehingga pelayanan ibadah haji dan umrah bisa dimaksimalkan," sambung Totok.

Kemudian, lanjut politikus F-PAN ini, poin penting lainnya yang diatur dalam RUU ini ialah calon peserta ibadah haji yang sudah membayar cicilan atau tabungan haji akan mendapatkan laporan keuangannya

secara *virtual*. Dengan demikian, pengelolaan keuangan haji lebih profesional dengan tetap memperhatikan sistem syariah.

Selain itu, untuk menjamin kepastian dan kelancaran penyelenggaraan haji reguler, pendanaannya bersumber dari keuangan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Peminjaman dana dilaksanakan 15 hari sejak besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan terbuka terhadap usulan-usulan baru jika memang diperlukan. "Mudah-mudahan apa yang menjadi keseriusan kita untuk melahirkan undang-undang yang berpihak pada rakyat ini bisa diperjuangkan semaksimal mungkin," Diakhir rapat, seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan ke-tingkat Paripurna agar disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR disertai dengan penyerahan pandangan mini fraksi secara tertulis. ■

(ann,mp), foto jayadi/hr.



Tim Kunspek Komisi IV meninjau lokasi budidaya kepiting dan rajungan di Tanjung Widura

di atas 15 sentimeter, dan rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 sentimeter.

Selain itu, aturan tersebut juga

Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM), "Hendaknya peraturan tersebut diterapkan secara adil selama ini nelayan Gersik mengeluhkan perahu trol yang

melarang penangkapan atas lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, seluruh jajaran yang ada di KKP menjalankan peraturan tersebut, misalnya Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

sering beroperasi di laut Gersik dan reklamasi pantai yang membuat nelayan makin susah untuk mencari ikan," tegas Herman.

Usai melakukan pertemuan dengan nelayan setempat tim Komisi IV DPR langsung diarahkan menuju sungai panjang untuk melepas benih rajungan.

Pada rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP tanggal 13 april 2016, disepakati bahwa Menteri akan mencabut Peraturan Menteri KKP No. 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan namun implementasi dilapangan belum berjalan. ■

(And) foto:Andri/hr.



## Revisi UU Pilkada Diharapkan Tidak Diskriminatif

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang kini sedang dirumuskan Komisi II DPR RI dengan pemerintah, diupayakan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara yang ingin berkompetisi dalam Pilkada. RUU ini memperlakukan semua warga negara setara.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy pada diskusi Forum Legislasi tentang RUU Pilkada, Selasa (26/4). Hadir pula sebagai pembicara Juri Ardiantoro (komisioner KPU) dan Karyono Wibowo (Indonesia Public Institute). Banyak isu penting yang sedang dibahas, mulai dari syarat bagi calon perseorangan, ketentuan mengundurkan diri dari jabatan publik, dan politik uang.

Isu paling seksi adalah ketentuan syarat bagi calon perseorangan. Dijelaskan



Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy dalam acara Forum Legislasi perihal RUU Pilkada

Lukman, perkembangan terakhir dari RUU Pilkada ini, mensyaratkan 6,5-10 persen dukungan berdasarkan daftar pemilih tetap bagi calon perseorangan. "Ini sudah menjadi angka psikologis publik," ungkap politisi PKB tersebut.

DPR dan pemerintah sudah sepakat soal angka ini. Sementara untuk calon kepala daerah dari partai politik mensyaratkan 15-20 persen. Penetapan

angka-angka ini ke dalam rumusan RUU sudah mempertimbangkan asas keadilan dan kesetaraan. Isu ini menjadi sangat seksi di publik, terutama bersamaan dengan pencalonan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Menurut pengamat politik Karyono Wibowo, syarat yang ditetapkan dalam RUU ini sudah ideal, walau mungkin dirasa memberatkan bagi calon perseorangan. Yang paling penting adalah bagaimana memperkuat verifikasi. Tak banyak calon perseorangan yang terpilih dalam kompetisi Pilkada. Angkanya masih di bawah 10 persen. Sisanya, selalu dimenangkan para politisi.

Syarat calon perseorangan, sambung Karyono, tak perlu diperberat lagi. Apalagi, isu ini juga sangat sensitif, karena dipicu pencalonan Ahok di Pilkada DKI. "Menurut saya tetap direntang 6,5-10 persen saja. Tak perlu ditambah lagi," katanya dalam diskusi tersebut. ■

(mh), Foto: Naefurajji/hr

## Permasalahan Lapas Perlu Segera Diselesaikan

Anggota Komisi III DPR Romahurmuzyi menilai, kejadian kerusuhan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) akan terus terulang selama penyebab kerusuhan di lapas itu sendiri tidak diselesaikan. Hal ini dikatakannya, ketika menanggapi terjadinya pembakaran Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

"Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, rasio petugas yang tak sebanding, dan tahanan yang stres karena tidak bisa mendapatkan remisi adalah rangkaian penyebabnya, masalah ini terdapat hampir di semua lapas di Indonesia," kata Romy, panggilan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/04).

Lebih lanjut, politisi F-PPP itu mengatakan, di Indonesia penghuni yang melebihi kapasitas sudah mencapai 370 persen. Maka dari itu, Komisi III sedang

merevisi UU KUHP, terutama terkait dengan terpidana narkoba. Karena 70 persen terpidana yang menghuni lapas itu adalah terpidana narkoba, dan diantara mereka, sebanyak 80 persen adalah pengguna yang memerlukan hukuman sosial.

"Sehingga memang dari Badan Narkotika Nasional (BNN) itu memburu bandar narkoba yang berada di luar lapas, lebih baiknya kalau semua lapas dilakukan razia secara mendadak dan di seluruh tempat di Indonesia karena itu sudah cukup membantu mengurangi peredaran narkoba," tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Terkait revisi UU KUHP, masih kata Romy, dimungkinkan bagi pengguna pertama narkoba akan diberikan hukuman sosial.

"Karena itu satu-satunya cara kalau kita tidak mampu menyediakan anggaran untuk membangun lapas. Saya kira untuk



Anggota Komisi III DPR Romahurmuzyi

pidana narkoba perlu diberi isolasi, apalagi yang sifatnya kambuhan karena dampak merusak mereka jauh lebih besar dari pada terorisme," tegasnya. ■

(rmm,nt), Foto: Jayadi/hr



# Komisi VIII DPR Serap Masukan Terkait Kesiapan Daerah Dalam Mengantisipasi Bencana

**M**. Lutfi politisi dari F-Partai Golkar yang juga Putera Daerah dari Dapil NTB memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim kunjungan kali ini diikuti pula oleh delapan orang anggota guna meninjau sejumlah daerah yang berpotensi rawan gempa bumi, gelombang pasang dan banjir.



Pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII dengan BPBD Provinsi NTB

Dalam pertemuannya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Prov. NTB Ridho Ahyana beserta jajarannya, Tim Kunjungan Komisi VIII DPR ingin mengetahui, terkait tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di Prov. NTB. Jum'at (09/04).

"Apakah Provinsi NTB telah menyiapkan dan menyusun Perda tentang penanggulangan bencana, dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana?" tanya M. Lutfi.

Menurut Lutfi, indeks rawan bencana yang terjadi ada di level tinggi, artinya di wilayah yang termasuk daerah tidak aman dari bencana alam, "ada sebelas provinsi yang perlu diwaspadai terkait bencananya, seperti gempa bumi, banjir bandang, gelombang pasang, kekeringan dan erupsi gunung," jelas Lutfi.

Lutfi mencontohkan, pada akhir tahun lalu terjadi peristiwa erupsi Gunung Rinjani yang membuat panik masyarakat disekitarnya, "aktifitas masyarakat terganggu dengan peristiwa erupsi gunung Rinjani. Itu berdampak besar. Oleh karena itu peran pemerintah dalam penanganan bencana sangatlah penting," tegas Lutfi.

Menanggapi hal tersebut, dalam penjelasannya, Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB Ridho Ahyana menerangkan sangat mengapresiasi masukan dari Komisi VIII DPR terkait penanggulangan bencana. Dan saat ini, tambah Lutfi, BPBD Prov. NTB tengah mempersiapkan antisipasi terkait

bencana kekeringan yang akan terjadi.

"BPBD Prov. NTB tengah bersiap akan datangnya bencana kekeringan dan itu yang sedang kami bahas. Untuk bencana banjir, kami sudah banyak berbuat dilapangan, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," terang Ridho.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika di bulan Mei nanti, akan terjadi kekeringan, "Ada 300 desa yang kami perhatikan akan mengalami kekeringan. Kami terus melatih dan menginformasikan kepada warga desa tentang cara dalam menghadapi bencana kekeringan. Kita akan didik masyarakat agar siap menghadapi bencana," jelas Ridho.

Sementara itu, anggota Tim Kunjungan Komisi VIII Kuswiyanto mengapresiasi langkah BPBD Prov. NTB dalam mengantisipasi bencana, "Saya apresiasi antisipasi penanganan bencana dari BPBD untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan tugas dari negara, tugas dari pemerintah," tegas Kuswiyanto yang juga politisi dari Fraksi PAN ini.

Kuswiyanto menambahkan, Indonesia adalah negara dengan rawan bencana, dan NTB termasuk di dalamnya, sehingga diharapkan pemerintah dapat merumuskan dengan jelas dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.

"Menurut saya rumusnya adalah kalau sementara ini belum ada kemampuan untuk melindungi, untuk menjaga dari berbagai kemungkinan, rakyatnya ini harus

diajari untuk ramah dengan bencana. Yang kedua, kita ini kan lagi prihatin, kita meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membuat peta bencana nasional termasuk untuk NTB. Peta bencananya ini bagaimana?. Karena dari peta bencana ini kita akan melihat secara utuh secara komprehensif, sesungguhnya di NTB ini bencana apa yang sering terjadi?" tanya Kuswiyanto.

Disamping itu, kata Kus, ada dampak secara luas, pertama, dampaknya bagi manusia, kedua, dampak bagi alam, ketiga adalah dampak bagi tumbuhan, binatang, dan lainnya. "Setelah itu baru bisa dianggarkan, kira-kira dalam menanggulangi bencana itu akan diatasi dengan model bagaimana, kemudian ada pembagian tugas pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa," ujarnya.

Dari pemaparan BPBD Prov. NTB, menurut Kuswiyanto, diketahui, bahwa ternyata bencana yang sering terjadi pertama adalah banjir, "Sekarang kalau banjir maka harus dibuat peta rawan bencananya, terjadi berapa tahun sekali, sungai itu apa tergolong sungai nasional, sungai provinsi, atau sungai kabupaten. Baru setelah itu, pemerintah membuat *grand design*, kalau nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kalau provinsi dibuat oleh provinsi, kalau kabupaten kota itu dibuat oleh kabupaten," tandasnya.

"Dari *grand design* itu bisa dilihat seberapa kemampuan untuk mengatasinya dan kira-kira akan diatasi selama berapa tahun, peta itu harus betul-betul ada sehingga untuk mengatasinya bukan hanya sekedar dimensi jangka pendek tetapi jangka panjang, sehingga dalam mengatasi sekali itu bisa langsung dirasakan dan tidak akan terjadi kembali lagi," tambahnya.

Usai melakukan diskusi, Tim Kunjungan Kerja Spesifik beranjak dari ruang pertemuan untuk meninjau salah satu anak sungai di daerah Jempong, Mataram, Nusa Tenggara Barat. ■

(Ihr, nt), Foto: Hindra/hr



## Komisi VIII Tinjau Pelayanan dan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Sulawesi Selatan

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengadakan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, guna melaksanakan fungsi pengawasan dalam bidang keagamaan khususnya permasalahan pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah.

"Pada kunjungan ini Komisi VIII bermaksud untuk menyerap aspirasi mengenai berbagai persoalan dan kondisi yang terkait dengan bidang kerja khususnya bidang penyelenggaraan ibadah umrah serta bidang keagamaan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Anggota Komisi VIII Samsu Niang, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar, Jum'at (22/4).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia



Suasana Pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel

Perjuangan, memaparkan bahwa seperti diketahui jamaah umrah Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2015 tercatat *visa* umrah yang keluar mencapai 1,5 juta jamaah. Seiring dengan hal tersebut, meningkat pula permasalahan bagi jamaah umrah.

Komisi VIII mengapresiasi terkait pemberian sanksi yang telah dikeluarkan

oleh Kementerian Agama sebanyak 14 penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Namun, kata Samsu, hal tersebut dirasakan belum memberikan efek jera dikarenakan sejak awal bulan Januari sampai sekarang, masih ada jamaah umrah yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Belum lama ada informasi, jamaah asal Sulawesi Selatan terlantar sebanyak 70 jamaah, selanjutnya 2.700 jamaah asal Jawa Timur juga tertunda keberangkatannya dikarenakan oleh *visa* yang tidak keluar.

"Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi VIII, khususnya kepada Kanwil-Kanwil seluruh Indonesia untuk berupaya pengawasan dan mensosialisasikan program-program agar kasus jamaah umrah yang terlantar dapat diminimalisirkan atau dapat dicegah sedini mungkin," tegasnya. ■

(as) Foto:Foto: Agung/hr

## Peringati Hari Kartini, PIA DPR Kunjungi Rutan Pondok Bambu

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI mengunjungi rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Kunjungan kami ke Rutan Wanita Pondok Bambu ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kami ingin menjalin tali kasih kepada warga binaan yang ada di Rutan Pondok Bambu. Karena bagaimanapun juga warga binaan di rutan ini juga menjadi Kartini bagi keluarganya masing-masing," ungkap Ketua umum PIA DPR RI, Netty Ade Komarudin usai kunjungan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (26/4).

Kegiatan tersebut, lanjut Netty merupakan bagian dari program sosial

PIA selama ini. Karena sebagai bagian dari masyarakat merupakan tanggung jawab PIA jugalah untuk ikut membantu warga binaan agar kelak bisa kembali hidup dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Pada kesempatan itu Netty yang didampingi oleh Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon dan Ishta Agus Hermanto serta dihadiri isteri-isteri dari 10 Fraksi DPR RI ini juga mengapresiasi program-program pembinaan yang dibuat pihak Rutan untuk menyiapkan warga binaan menjadi warga negara yang lebih baik.

Hal itu terlihat dari adanya berbagai kegiatan baik kegiatan keagamaan, olahraga, jasa boga, kecantikan dan



Ketua umum PIA DPR RI Netty Ade Komarudin

keterampilan berupa karya seni lainnya.

Sementara itu Kepala Rutan Jakarta Timur, Sri Susilarti mengaku terharu sekaligus bahagia atas kehadiran PIA DPR. Karena menurutnya ada tiga pilar dalam Pemasayarakatan, yakni warga binaan, petugas, dan masyarakat.

Baik Netty maupun Sri berharap agar pertemuan yang singkat itu dapat membawa manfaat ke depannya. ■

(Ayul), Foto: Rumi/hr



Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengambil sumpah Direksi Pelindo II

## Pelindo II Langgar Aturan IMB Proyek Kalibaru

**K**etua Panitia Khusus (Pansus) Angket tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menengarai adanya penyimpangan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dalam proyek pembangunan New Priok. Pelindo II ternyata belum sepenuhnya mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk proyek di Kalibaru.

"Ada persoalan yang cukup serius dengan Proyek Kalibaru yang anggarannya itu dikatakan senilai Rp. 46 triliun. Informasi awal yang kami peroleh, IMB satu-satunya yang dikeluarkan adalah IMB Gardu Listrik di Kalibaru. Jadi, tidak ada IMB yang di darat maupun di laut," ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa *stakeholder* di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/04) sore.

Sementara itu, Rio Lase selaku Kepala Biro Strategi PT Pelindo II menyatakan bahwa pihaknya telah memegang IMB dari Pemerintah DKI untuk fasilitas penunjang disisi darat termasuk membangun *gate*. "Kami sudah pernah mengajukan IMB untuk gardu listrik dan

*gate* dan sekarang pembangunan sedang berlangsung," terangnya.

Namun, pernyataan tersebut disangkal oleh Gamal Sinurat, Asisten Daerah (Asda) Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum pernah menerbitkan IMB bangunan lain. "Pemprov DKI hanya pernah menerbitkan IMB untuk gardu listrik atas nama Pelindo II dengan luas bangunan 220 m2 terdiri dari dua lantai di darat sedangkan IMB Kalibaru tidak ada," ungkap Gamal.

Dijelaskan Rio, Peraturan Presiden didapatkan sekitar April 2012 tetapi ternyata tidak bisa langsung dilaksanakan pembangunan karena harus merujuk pada beberapa peraturan, khususnya pada Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008. Meskipun, Perpres itu diterbitkan namun Pelindo harus tetap meminta izin pembangunan serta menunggu AMDAL yang terbit pada Desember 2012 untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Ditambahkannya, sehingga awal pembangunan Kalibaru dimulai pada Januari 2013 sedangkan izin trase jalan

pada 2014. Sementara itu, perihal izin pengerukan dan reklamasi sudah 3 kali diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 tahun 2014.

Disisi lain, anggota Pansus Hak Angket tentang Pelindo II Nurdin Tampubolon menyoroti David Wignal yang merupakan warga asing, ia awalnya ditunjuk sebagai *advisor*, namun kemudian diangkat menjadi *Vice President* Pelindo II. Menurutnya, hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut. "Saya ga tau yah apakah peraturan perundang-undangan kita bisa mengangkat WNA menjadi eksekutif disuatu perusahaan milik negara. Setahu saya tidak, kecuali perusahaan itu adalah perusahaan joint venture atau perusahaan patungan," papar politisi Hanura ini.

David Wignal yang turut hadir dalam RDPU tersebut, diketahui menjadi *advisor* PT. Pelindo II sejak tahun 2010 mulai dari penyusunan kerangka kelayakan studi Kalibaru, *business plan* serta proses pengadaan investasi termasuk bagaimana menyakinkan investor. Kemudian, pada Januari 2015 David Wignal diangkat menjadi *Vice President* Pelindo II. ■



# BERITA BERGAMBAR



Prosesi pelantikan Anggota DPR Eddy Kusuma Wijaya periode 2014-2019 dipimpin Ketua Mahkamah Agung, disaksikan Pimpinan DPR dalam sidang paripurna DPR Jum'at (29/4). Foto: Runi/hr



Prosesi pengambilan sumpah PAW Anggota DPR dipandu Ketua DPR Ade Komarudin kepada tiga Anggota DPR periode 2014-2019 di Ruang Sidang Paripurna Jum'at (29/4), Foto: Jaka/hr



Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional bertema "Penguatan Badan Keahlian dalam Rangka Percepatan Reformasi DPR RI" di Gedung DPR Kamis (27/4), Foto: Hindra/hr



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR mengunjungi Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (26/4). Foto: Runi/hr

